



SIARAN PERS

Gelar Penguatan Kelembagaan, Bawaslu Kota Pasuruan Fokus pada Penguatan Data untuk Demokrasi

Kota Pasuruan, 9 Oktober 2025 — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pasuruan menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Subtema Pengolahan Data dengan tema “Penguatan Data untuk Demokrasi: Rekomendasi Evaluatif Bawaslu Kota Pasuruan” di Ascent Premiere Hotel & Convention Pasuruan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Bawaslu dalam memperkuat tata kelola data pengawasan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas demokrasi.

Kegiatan ini menghadirkan berbagai narasumber lintas sektor, di antaranya Anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI La Ode Khoirul A.R, Jurnalis dan Praktisi JEPR Jatim Rico Nurfiansyah Ali, serta Akademisi FISIP Universitas Airlangga Dr. Probo Darono Yakti.

Turut hadir Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur Rusmifahrizal Rustam, serta jajaran Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Pasuruan. Acara dipandu oleh Arif Syaifurrohman dan dibuka secara resmi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Data Sebagai Fondasi Demokrasi

Ketua Bawaslu Kota Pasuruan, Vita Suci Rahayu, dalam sambutannya menegaskan bahwa penguatan data pengawasan merupakan kunci utama dalam menjaga integritas pemilu.

“Data bukan sekadar angka, tetapi dasar bagi setiap rekomendasi pengawasan yang tajam, komprehensif, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Bawaslu Kota Pasuruan mencatat 7.981 dokumen hasil pengawasan Pemilihan Serentak 2024, dengan 82 potensi pelanggaran (1,04%), namun hanya 2 kasus yang berlanjut hingga tahap rekomendasi, menunjukkan drop rate sebesar 99,27%.

Sebagian besar potensi pelanggaran telah dicegah melalui mekanisme Saran Perbaikan (Sarper), yang ditindaklanjuti 100% oleh pihak terkait.

Berdasarkan analisis ASUM DM (Analisis Sistem dan Metodologi Data Mining), ditemukan Gap Deployment sebesar 30,7%, menandakan perlunya peningkatan penggunaan teknologi digital dalam sistem pengawasan.

“Ke depan, kita harus memperkuat digitalisasi dan sistem pelaporan berbasis data. Pengawasan tidak boleh hanya administratif, tetapi harus prediktif dan terintegrasi,” tegas Vita.

Dukungan Komisi II DPR RI: Bawaslu Harus Kuat dan Mandiri

Anggota Komisi II DPR RI, Arif Wibowo, dalam pemaparannya menyampaikan pentingnya memperkuat posisi dan kewenangan Bawaslu agar mampu menjalankan mandat pengawasan secara efektif.

“Kerja demokrasi bukan pekerjaan musiman, tapi kerja tanpa henti. Karena itu, Bawaslu harus memiliki kewenangan kuat dan status kelembagaan yang mandiri,” ujarnya.

Ia berkomitmen memperjuangkan agar seluruh Bawaslu di tingkat kota/kabupaten mendapatkan status satuan kerja (satker) mandiri dengan dukungan sumber daya manusia yang setara dengan KPU.

“Hubungan antara komisioner dan sekretariat perlu diperkuat. Bawaslu harus memiliki kantor permanen dan struktur kelembagaan ideal di semua tingkatan,” tambahnya.

Rusmifahrizal: Data Adalah Pilar Keadilan Pemilu

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Rusmifahrizal Rustam, menegaskan pentingnya pengolahan data pengawasan sebagai dasar penegakan keadilan pemilu.

“Dari data itulah kita bisa menegakkan keadilan Pemilu dan menjaga demokrasi tetap kuat,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Rumah Data Pengawasan Bawaslu Jawa Timur telah dikembangkan untuk mengintegrasikan hasil pengawasan dari seluruh kabupaten/kota.

“Rekomendasi Bawaslu bukan sekadar saran, tetapi harus dilaksanakan. Data yang akurat akan menjadi bukti kuat dalam setiap proses penegakan hukum kepiluan,” tegasnya.

Kolaborasi Multipihak: Lima Pilar Pengawasan Partisipatif

Bawaslu Kota Pasuruan mendorong kolaborasi lintas sektor melalui Lima Pilar Pengawasan Partisipatif, yaitu:

1. Akademisi – mengembangkan riset, sistem informasi, dan early warning system berbasis AI.
2. Media – memperkuat liputan investigatif dan portal transparansi data.
3. Tokoh Agama – membangun moralitas dan pendidikan pemilih berintegritas.
4. Pemilih Pemula – menggerakkan relawan digital dan aplikasi pelaporan.
5. LSM/Ormas – mendukung audit independen dan pelatihan pengawas partisipatif.

Bawaslu menargetkan pembentukan 1.000 relawan pengawas, 1 aplikasi mobile, serta 1 portal transparansi pengawasan publik, dengan harapan menurunkan angka potensi pelanggaran tidak tertindak dari 99% menjadi di bawah 50%, dan menekan kesenjangan teknologi pengawasan di bawah 10%.

Pandangan Akademisi dan Praktisi: Data Adalah Cermin Kejujuran Demokrasi

Akademisi FISIP Universitas Airlangga, Dr. Probo Darono Yakti, menegaskan bahwa kejujuran di era digital tidak hanya diukur dari moralitas, tetapi juga dari sistem yang transparan dan dapat diverifikasi publik.

“Data bukan sekadar angka, tetapi cerita tentang integritas demokrasi. Mengelola data dengan jujur berarti menjaga republik,” ujarnya.

Sementara itu, Rico Nurfiansyah Ali, dari Jaringan Edukasi Pemilu untuk Rakyat (JEPR), menyoroti perlunya memperkuat pengawasan terhadap proses kepesertaan partai politik.

Menurutnya, syarat pendirian dan verifikasi partai politik yang terlalu longgar berpotensi melemahkan kualitas demokrasi.

“Kalau Bawaslu diperkuat, termasuk dengan penambahan pengawas TPS, ruang kecurangan bisa kita tutup,” tegasnya.

Penutup: Dari Data ke Aksi untuk Demokrasi Berintegritas

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pasuruan, Prisma Agustian Prasetya Wisandha, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas kelembagaan melalui penguatan sistem data hasil pengawasan Pemilu 2024.

“Tema ini kami pilih untuk memastikan rekomendasi Bawaslu semakin objektif dan akuntabel. Kapasitas SDM, infrastruktur digital, dan sistem pelaporan akan terus kami perbaiki,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Pasuruan menegaskan komitmennya untuk:

- Membangun sistem pengawasan berbasis data dan teknologi digital,
- Memperkuat kolaborasi lintas lembaga,
- Dan menciptakan demokrasi yang transparan, inklusif, dan berkeadilan.

“Demokrasi yang sehat dimulai dari pengawasan yang kuat, dan pengawasan yang kuat dimulai dari data yang jujur,” tutup Vita.



Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Bawaslu Kota Pasuruan

Jl. Untung Suropati No.23 Kota Pasuruan

Telp/WA: (0343) 4742943/ 0822 2911 1648

Email: set.pasuruankota@bawaslu.go.id